

BAB I

PENDAHULUAN

I.1 Latar Belakang Masalah

Politik dan media ibarat dua sisi dari satu mata uang. Media massa, khususnya harian dan elektronik, memerlukan karakteristik yang dimiliki oleh ranah politik praktis seperti hingar bingar, cepat, tak memerlukan kedalaman berpikir, dan terdiri dari tokoh-tokoh antagonis dan protagonist, begitu juga Politik memerlukan media massa sebagai wadah dalam mengelola kesan yang hendak diciptakan. Tidak ada gerakan sosial yang tidak memiliki divisi media. Apapun bidang yang digeluti oleh sebuah gerakan, semuanya memiliki perangkat yang bertugas untuk menciptakan atau berhubungan dengan media.

Fungsi media massa sesungguhnya adalah memberikan informasi, memberikan pendidikan, memberikan hiburan, dan melakukan control social. Dalam menyajikan informasi media harus netral dan sesuai dengan peristiwa yang sebenarnya. Namun fenomena yang terjadi sekarang ialah sebaliknya dimana media cenderung tidak netral, baik secara teoritis maupun praktis, pemilihan atas peristiwa apa yang menjadi headline, siapa yang menjadi narasumber, bahasa apa yang digunakan, atau sudut pandang apa yang dipakai dalam membaca fakta.

Terbukanya ruang kebebasan berpolitik secara luas berdampak pada keleluasaan seseorang menjadi politikus. Hal ini terlihat dari banyaknya para

pebisnis, para professional maupun artis yang berbondong-bondong ikut andil bagian dalam politik praktis. Di Indonesia banyak dari para kaum pemilik modal ataupun pebisnis yang memiliki afiliasi politik terhadap kepentingan ekonomi mereka, dan tidak jarang dari mereka memasuki bidang-bidang dunia warta atau pers.

Sejak ditetapkannya undang-undang kebebasan pers media dengan bebas dapat mensortir berita yang akan diwartakan kepada publik. Keleluasaan media dalam pemberitaan pada mulanya diharapkan dapat berperan menjadi instrument pengawasan masyarakat terhadap kinerja pemerintah. Meskipun sampai saat ini peranan tersebut tetap dijalankan dengan baik oleh media, akan tetapi permasalahan independensi pers media yang memudar juga menjadi permasalahan sentral pers media.

Melihat dari perspektif akademis, adanya kebebasan pers tentu saja bernilai positif untuk pembangunan politik masyarakat Indonesia. Transparansi kinerja pemerintah, kasus-kasus pejabat pemerintah serta kebijakan-kebijakan pemerintah mengenai ekonomi dan moneter dapat dijadikan muatan berita yang dapat dikonsumsi politik secara luas.

Dikarenakan saat ini masyarakat memilih banyak sumber yang dapat diakses guna mengetahui duduk permasalahan-permasalahan sosial politik. Hal yang demikian secara tidak langsung akan berimplikasi pada peningkatan pemahaman terhadap ilmu politik dan juga berpengaruh positif terhadap sikap kedewasaan politik masyarakat.

Meskipun media memiliki peranan positif terhadap pembangunan politik masyarakat, media juga memiliki dampak negatif bagi perkembangan politik di masyarakat. Salah satu permasalahannya adalah terkooptasinya independensi pemberitaan dalam media telah menimbulkan beberapa polemik diantaranya adalah proses pembingkaihan berita atau dikenal dengan istilah *framing process*.

Pada hakikatnya *framing process* didefinisikan sebagai proses membuat suatu pesan lebih menonjol, menempatkan sebuah informasi lebih daripada informasi yang lain, sehingga khalayak lebih tertuju pada pesan tersebut. Dari definisi tersebut dapat ditarik sebuah penalaran bahwasanya *framing* merupakan sebuah usaha yang dilakukan oknum media agar dapat menciptakan ingatan-ingatan positif maupun negatif dalam masyarakat.

Dari teori tersebut dapat diasumsikan bahwasanya *framing process* merupakan tindakan konstruktif yang dibangun oleh sekelompok orang atau individu yang dapat berdampak luas pada khalayak umum. Proses pembingkaihan berita dapat berdampak pada legitimasi sosial, pembentukan opini publik serta dapat menjadi sarana konstruksi gerakan sosial (*social movement*).

Meskipun saat ini banyak awak media yang menyatakan bahwa mereka telah objektif dan independen dalam menelaah kasus dan menyiarkan pemberitaan, akan tetapi proses pembingkaihan berita yang kurang independen masih saja kerap terjadi. Hal seperti ini secara akademis dan hukum ternilai cacat.

Sebagai contoh kongkret adalah pemilihan diksi terhadap kasus lumpur Lapindo di Porong, Sidoarjo tahun 2006. Tragedi luapan lumpur lapindo terjadi pada 27 Mei 2006. Peristiwa ini menjadi suatu tragedi ketika banjir lumpur panas mulai menggenangi area persawahan, pemukiman penduduk dan kawasan industri. Hal ini wajar mengingat volume lumpur diperkirakan sekitar 5.000 hingga 50.000 meter kubik perhari (setara dengan muatan penuh 690 truk peti kemas berukuran besar).

Akibatnya, semburan lumpur ini membawa dampak yang luar biasa bagi masyarakat sekitar maupun bagi aktivitas perekonomian di Jawa Timur. Genangan hingga setinggi 6 meter pada pemukiman dan total warga yang dievakuasi lebih dari 8.200 jiwa, rumah/tempat tinggal yang rusak sebanyak 1.683 unit, areal pertanian dan perkebunan rusak hingga lebih dari 200 ha begitu juga lebih dari 15 pabrik yang tergenang menghentikan aktivitas produksi dan merumahkan lebih dari 1.873 orang, tidak berfungsinya sarana pendidikan, kerusakan lingkungan pada wilayah yang tergenangi, rusaknya sarana dan prasarana infrastruktur serta terhambatnya ruas jalan tol Malang-Surabaya yang berakibat pula terhadap aktivitas produksi di kawasan Ngoro (Mojokerto) dan Pasuruan yang selama ini merupakan salah satu kawasan industri utama di Jawa Timur.

Akibat dari adanya semburan lumpur lapindo yang meluap hebat, berdampak pada menelan korban jiwa dan menggenangi 850 hektar lahan, 16.300 unit rumah lebih, 33 unit sekolah, 4 kantor pemerintahan, 29 unit pabrik, 11 home industry, 11 masjid, 57 musholla, 3 pondok pesantren, 1

panti & 28 TPQ. Lumpur Lapindo juga menjadikan 21.674 Kepala Keluarga dengan 36.846 jiwa menjadi pengungsi dan merusak infrastruktur yang ada seperti saluran listrik, telepon, dan irigasi. **Korban Lumpur Lapindo yang ditetapkan oleh Presiden ke dalam peta area terdampak sejak tanggal 22 Maret 2007 saat ini sebagian besar menunggu komitmen sisa pembayaran 80 persen. Jumlah mereka kurang lebih 14.000 ribu kepala keluarga. Namun diantara 14.000 kepala keluarga itu ada yang belum menerima uang muka 20 persen. Dengan perincian sebanyak 113 kepala keluarga dari Desa Renokenongo (minus pengungsi di Pasar Baru Porong) belum menerima uang muka 20 persen, ada pemilik 190 aset yang ada di Desa Kedung Bendo juga belum menerima uang muka 20 persen.**

Media sebagai salah satu kekuatan politik memang telah banyak di perbincangkan dalam konteks politik modern. Selain LSM (Lembaga Swadaya Masyarakat), Pengusaha, Militer dan Mahasiswa, Media merupakan element yang memiliki pengaruh dalam bidang politik. Ditambah lagi dengan diberlakukannya Undang-undang kebebasan pers, membuat media semakin sentral peranannya di dalam ranah politik praktis.

Peranan media terhadap kepentingan-kepentingan politik tidak dapat terlihat secara langsung tanpa menggunakan analisa-analisa objektif di dalamnya. Meskipun demikian, kebutuhan organisasi-organisasi politik (semisal partai politik) terhadap tingkat elektabilitas maupun pencitraan para

calon ataupun partai itu sendiri dapat dijadikan alasan mendasar dari hubungan media dan kepentingan-kepentingan organisasi politik.

Kajian-kajian maupun tulisan-tulisan yang berkenaan tentang media sebagai kekuatan politik telah banyak berkembang dari pemikiran para akademisi. Sebut saja Timothy Besley, Robin Burgess, dan Andrea Prat tentang *Political Agency*. Di dalam tulisan tersebut mereka berpendapat bahwasanya, media memiliki peranan yang cukup sentral pada ranah politik.

Mereka berargumentasi bahwasanya media terbagi menjadi dua bagian yaitu:

1. Pertama media yang bebas atau media yang independen. Media yang bebas nantinya akan berdampak pada meningkatnya pelayanan pemerintah dalam cangkupan kepentingan publik.
2. Kedua dinamakan media yang terperangkap. Media tersebut merupakan golongan media yang terkooptasi oleh kepentingan-kepentingan politik pemerintah, sehingga kemudian akan berdampak pada ketidakbebasan media dalam mewartakan suatu peristiwa (Timothy Besley, Robin Burgess, dan Andrea Prat, 2006: 61).

Penulis menitik beratkan penelitian tentang kasus lumpur Lapindo di Kompas.com dan Viva News di karenakan, Kompas.com di asumsikan sebagai media yang netral dan independent karena Kompas.com tidak di miliki oleh pengusaha yang tidak terjun keranah perpolitikan, sedangkan

Viva news penulis argumenkan sebagai media yang terperangkap karena Viva News salah satu perusahaan pertelevisian yang di miliki oleh Bakrie yang dapat di ketahui Bakrie adalah pemilik saham PT. Lapindo Brantas dan juga pengusaha yang terjun ke ranah perpolitikan.

Mengacu dari perspektif tersebut penulis berasumsi bahwasanya peranan media terhadap dunia perpolitikan sangatlah besar. Media dewasa ini bukan hanya berpengaruh pada tatanan system pemerintahan elit pemerintah saja, akan tetapi juga berkembang sebagai kekuatan politik para pemilik modal dan para pengusaha yang terjun ke dalam dunia politik.

Kepentingan-kepentingan politik pemilik perusahaan media sedikit banyak telah berpengaruh pada nilai subjektivitas dan nilai indepedensi berita. Hal ini dapat tercermin dari pemilihan diksi-diksi pada berita yang menonjolkan ataupun menjatuhkan seseorang atau kelompok dalam kepentingan-kepentingan politik. Sehingga berita-berita yang saat ini terwartakan kepada masyarakat jauh dari etika-etika jurnalisitik dan pewartaan saat ini cenderung sebagai alat pencitraan semata.

Pemilihan diksi terhadap kata-kata yang diwartakan kepada masyarakat dijadikan sebagai alat tarik ulur kepentingan politik pada dua media televis tersebut. Hal ini tentu saja dilakukan oleh kedua media tersebut untuk menciptakan bingkai (*frame*) yang bertujuan untuk keuntungan-keuntungan politik para pemilik perusahaan media.

Dengan memperhatikan permasalahan mendasar tersebut terdapat anggapan bahwa, adanya pencitraan kasus Lapindo pada media

Kompas.com dan Viva News sehingga berita mengenai lumpur lapindo diantara kedua media tersebut memiliki penonjolan aspek yang berbeda. Berdasarkan latar belakang masalah maka peneliti membuat judul skripsi yaitu, ” **Framing Pencitraan Kasus Lapindo Di Media Kompas.com dan Viva News**”.

I.2 Batasan Masalah

Berdasarkan identifikasi masalah tersebut di atas, maka batasan masalah pokok penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut:

“Bagaimana Framing Pencitraan Kasus Lapindo Di Media Kompas.com dan Viva News?”

I.3 Rumusan Masalah

Berdasarkan pembatasan masalah tersebut di atas, maka permasalahan pokok penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimana freaming pencitraan kasus Lapindo di media Kompas.com dan Viva News?
2. Bagaimana netralitasmedia Kompas.com dan Viva News dalam pencitraan kasus Lapindo?

I.4 Tujuan Penelitian

Tujuan diadakannya penelitian ini adalah untuk menjawab dan menganalisa pertanyaan yang tertera dalam rumusan masalah. Adapun tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui framing pada Pencitraan Kasus Lapindo Di Media Kompas.com dan Viva News
2. Untuk mengetahui netralitasmedia Kompas.comdan Viva News pada pencitraan Kasus Lapindo.
3. Untuk mengetahui citra kasus Lapindo pada pemberitaan di media Kompas.com dan Viva News

I.5 Manfaat Penelitian

Peneliti berharap bahwa dengan adanya penelitian ini dapat membawa manfaat kepada beberapa pihak sebagai berikut:

1. Bagi Akademisi

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan tambahan dalam mengembangkan keilmuan dibidang humas tentang Analisis Framing Pada kasus Lapindo di media Kompas.com dan Viva News

2. Bagi Perusahaan

Penelitian ini dapat digunakan sebagai masukan dan pengetahuan tambahan tentang Analisis Framing Pada kasus Lapindo di media Kompas.com dan Viva News

3. Bagi Peneliti

Penelitian ini dapat dijadikan masukan tempat peneliti bekerja untuk mendalami tentang Analisis Framing Pada kasus Lapindo di media Kompas.com dan Viva News

I.6 Sistematika Penulisan

Sistematika Pembahasan dalam penelitian ini dibagi menjadi 5 bab yang terdiri dari:

1. Bab I: Pendahuluan. Yang Berisi tentang gambaran umum yang meliputi latar belakang masalah, pembatasan masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penelitian.
2. Bab II: Kajian Pustaka. Dalam bab ini membahas tentang teori-teori yang berhubungan dengan Analisis Framing Pada kasus Lapindo di media Kompas.com dan Viva News
3. Bab III: Penyajian Data. Dalam bab ini menjelaskan tentang gambaran umum suatu perusahaan, struktur organisasi, dan lain sebagainya. Kemudian menjelaskan tentang Analisis Framing Pada kasus Lapindo di media Kompas.com dan Viva News

4. Bab IV: Analisis Data. Dalam bab ini menjelaskan temuan-temuan yang terjadi dalam bentuk-bentuk komunikasi yang digunakan Analisis Framing kasus Lapindo di media Kompas.com dan Viva News
5. Bab V: Penutup/Kesimpulan. Dalam bab ini menjelaskan tentang seluruh rangkuman yang ada dalam penelitian ini dan menjelaskan inti dari hasil penelitian ini

